

Tantangan demokrasi di Indonesia di era digital

Imam Lipi Prayoga

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: imamlipiprayoga41@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi digital; media sosial; literasi digital; Pancasila; tantangan demokrasi

Keyword:

Digital democracy; social media; digital literacy; Pancasila; democratic challenges

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap perpolitikan Indonesia, termasuk dalam cara demokrasi dipraktikkan dan dipahami oleh warga negara. Penelitian ini menelaah tiga dimensi utama: perkembangan demokrasi Indonesia di era digital, identifikasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital dan media sosial, serta kontribusi masyarakat, pemerintah, dan media dalam menjaga kualitas demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur akademik, regulasi, dan dokumentasi empiris yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang digital membuka peluang partisipasi yang

lebih luas sekaligus menghadirkan ancaman berupa penyebaran disinformasi, polarisasi opini, manipulasi politik, serta melemahnya budaya musyawarah. Sinergi kolektif seluruh elemen bangsa mutlak diperlukan guna memastikan teknologi digital berfungsi sebagai instrumen penguatan, bukan pelemahan, demokrasi Pancasila.

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology has fundamentally transformed the political landscape of Indonesia, including how democracy is practiced and perceived by citizens. This study examines three main dimensions: the development of Indonesian democracy in the digital era, identification of challenges posed by digital technology and social media, and the roles of civil society, the government, and the media in safeguarding democratic quality. Using a qualitative approach with a library research method, this study reviews academic literature, regulations, and relevant empirical documentation. The findings indicate that the digital space opens broader participation opportunities while simultaneously presenting threats including disinformation, opinion polarization, political manipulation, and a decline in deliberative culture. Collective synergy among all elements of society is essential to ensure digital technology serves as an instrument for strengthening Pancasila democracy rather than undermining it.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi tidak sekadar diadopsi secara prosedural, melainkan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individual dan tanggung jawab kolektif, serta mengedepankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sejak bergulirnya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia menempuh perjalanan panjang dalam mengkonsolidasikan sistem demokrasinya. Berbagai kemajuan berhasil diraih, mulai dari penyelenggaraan pemilihan umum yang kompetitif dan berkala, kebebasan pers yang semakin terbuka, hingga tumbuhnya masyarakat sipil yang aktif. Demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, serta kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Faslah, 2024). Namun, babak baru tantangan muncul seiring pesatnya penetrasi teknologi digital ke seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran media sosial, platform digital, dan akses informasi yang semakin mudah telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam politik, serta mengawasi jalannya pemerintahan (Sardini, 2018). Di era digital ini pula terbuka peluang terciptanya demokrasi yang lebih transparan, cepat, dan partisipatif, di mana masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam berbagai diskusi publik tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup serius. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi politik, serta polarisasi masyarakat di media sosial menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kualitas demokrasi. (Efendi et al.) Selain itu, rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Tantangan lain adalah munculnya praktik manipulasi opini melalui buzzer politik, penyalahgunaan data pribadi, serta kampanye digital yang tidak sehat. Perkembangan algoritma media sosial juga dapat membentuk ruang gema (echo chamber) yang membuat masyarakat hanya menerima informasi sesuai pandangan sendiri, sehingga sikap toleransi dan kemampuan berpikir kritis dalam kehidupan demokrasi dapat mengalami penurunan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan platform digital untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital. Peningkatan literasi digital, penguatan etika bermedia sosial, serta penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan tersebut (Efendi et al.).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia pada era digital saat ini?
2. Apa tantangan utama demokrasi di Indonesia akibat perkembangan teknologi digital dan media sosial?
3. Bagaimana peran Masyarakat, pemerintah, dan media dalam menjaga demokrasi di era digital?

Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia pada era digital saat ini.

2. Untuk menganalisis tantangan utama demokrasi di Indonesia akibat perkembangan teknologi digital dan media sosial.
3. Untuk memahami peran Masyarakat, pemerintah, dan media dalam menjaga demokrasi di era digital.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan study literatur (library research). Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai tantangan demokrasi di Indonesia pada era digital. Data diperoleh melalui studi Pustaka dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan demokrasi, media digital, hoaks, dan perkembangan teknologi informasi.

Pembahasan

Perkembangan demokrasi di Indonesia di era digital

Demokrasi Indonesia memasuki babak yang secara kualitatif berbeda ketika infrastruktur digital mulai merambah ke berbagai penjuru nusantara. Demokrasi di era modern menghadapi tantangan yang tidak mudah; percepatan perkembangan zaman, ditambah kompleksitas masalah sosial, politik, dan teknologi, menjadikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berhadapan dengan berbagai situasi baru yang menantang (Efendi et al.).

Dari perspektif konseptual, demokrasi merujuk kepada sistem kerajaan di mana rakyat dibenarkan untuk menyertai proses menggubal undang-undang berasal dari kata Yunani demos (rakyat) dan kratos (kuasa), bermakna kedaulatan di tangan rakyat.(Yacob, n.d.) Dalam penerapannya di Indonesia, demokrasi tidak hanya menuntut adanya kebebasan politik, tetapi juga memerlukan kesadaran, partisipasi aktif, dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.

Ruang digital pada dasarnya memiliki potensi besar untuk memperluas arena demokrasi. Masyarakat kini dapat terlibat secara langsung dalam berbagai diskusi publik, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, hingga mengorganisir gerakan sosial semua tanpa dibatasi ruang dan waktu. Peliputan jurnalisme warga (citizen journalism) yang masif melalui platform digital turut memperkuat akuntabilitas pemerintahan dengan menyajikan perspektif yang lebih beragam.

Namun, perkembangan ini tidak berlangsung secara merata. Kesenjangan digital yang masih menganga antara wilayah perkotaan dan perdesaan menciptakan ketimpangan akses yang pada gilirannya menghasilkan ketimpangan partisipasi politik. Tidak seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati temuan-temuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hal ini terkait erat dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. (Efendi et al.).

Industri media digital juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Andil media digital terhadap maju atau mundurnya demokrasi tidak dapat dimungkiri. Ketika media digital bersikap kredibel dengan menyajikan fakta

dan data secara akurat, ia dengan sendirinya mendapatkan kepercayaan Masyarakat dan kepercayaan ini menjadi modal utama untuk mengatasi tren-tren bermasalah seperti penyebaran berita bohong dan Perkembangan digitalisasi ekonomi yang merasuki media sosial telah menciptakan platform Social Commerce (S-Commerce) (Efendi et al.). S-Commerce merupakan evolusi bisnis online yang awalnya berkarakter semi-pasif menjadi platform bisnis dengan sistem informasi secara komunkatif (real-time)³². Mersden telah mengamati sekitar 20 definisi S-Commerce dan memberi kesimpulan S-Commerce adalah: “Bagian dari perdagangan elektronik yang melibatkan penggunaan media sosial, media online yang mendukung interaksi sosial dan kontribusi pengguna, untuk membantu pembelian dan penjualan produk dan layanan secara online (Supriyadi, 2024).

Tantangan utama Demokrasi di Era digital

Sejumlah tantangan serius mengancam kualitas demokrasi Indonesia dalam ekosistem digital. Ruang lingkup tantangan dalam demokrasi digital terbagi ke dalam tiga area utama: struktur kesempatan, tabiat para pemain politik, dan dampak-dampak negatif dari pemanfaatan TIK dalam ranah publik (Sardini, 2018).

Pertama, **polarisasi opini dan disinformasi**. Polarisasi merupakan fenomena yang lebih banyak berkembang di tingkat massa ketimbang di tingkat elite politik. Polarisasi terjadi karena komitmen yang kuat terhadap suatu budaya, ideologi, atau kandidat sehingga memecah suatu kelompok dengan kelompok lainnya membuat suatu kelompok menganggap pandangan dan prinsipnyalah yang paling benar, sedangkan kelompok yang berseberangan dianggap salah secara pandangan politik dan moralitas (Natasya et al., n.d.)

Kedua, **kebebasan berpendapat dan etika komunikasi**. Demokrasi Pancasila menghargai kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, namun perlu diperhatikan etika ketika berpendapat. Kebebasan ini, khususnya dalam konteks sila keempat Pancasila, dikedepankan sebagai sarana untuk bermusyawarah dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab — yakni kesadaran untuk menyampaikan pendapat tanpa ujaran kebencian, fitnah, atau penyebaran hoaks (Natasya et al., n.d.).

Ketiga, **manipulasi politik dan kampanye hitam**. Manipulasi politik dan kampanye hitam merupakan tantangan serius bagi demokrasi Pancasila di tengah perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Dunia digital yang diharapkan menjadi sarana baru untuk memperluas partisipasi publik dalam proses demokrasi, kini justru dimanfaatkan sebagai alat untuk memanipulasi opini dan menjatuhkan lawan politik secara tidak etis — ditandai dengan pergeseran praktik politik dari ruang fisik yang lebih terkontrol ke ruang digital yang sering kali bebas tanpa batas (Natasya et al., n.d.).

Keempat, **menurunnya budaya musyawarah**. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam Demokrasi Pancasila yang termaktub pada sila ke-4. Prinsip ini menekankan pentingnya proses diskusi, dialog, dan pencarian solusi bersama dengan mengedepankan kebijaksanaan dan persatuan. Namun di era digital, ruang digital sering kali lebih mengedepankan kecepatan dan emosi daripada kedalaman refleksi dan konsensus yang bermakna (Natasya et al.).

Kelima, **konflik horizontal dan ketidaksetaraan akses informasi**. Dalam era keterbukaan informasi, perbedaan pandangan politik menghadirkan tantangan tersendiri. Media sosial yang sering dimanfaatkan untuk membentuk opini, menyebarkan ujaran kebencian, serta menyampaikan berita bohong, dapat memicu polarisasi dan konflik di tengah masyarakat — berisiko mengurangi kualitas demokrasi yang seharusnya bertumpu pada nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Peran Masyarakat, Pemerintah, dan Media dalam Menjaga Demokrasi

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, tiga pilar utama memiliki peran yang saling melengkapi. Dalam demokrasi, ada dua prinsip utama: nilai pokok yang meliputi persamaan, kebebasan, musyawarah, dan keadilan; serta nilai derivasi yang merupakan penjabaran operasionalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wafa, 2024). Ketiga pilar berikut menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks digital.

Peran masyarakat bertumpu pada pembangunan kapasitas kritis warga negara. Masyarakat yang memiliki literasi digital tinggi mampu memilah informasi yang valid dari yang manipulatif, berpartisipasi secara konstruktif dalam diskursus publik, dan menolak menjadi agen penyebar hoaks. Keterlibatan aktif dalam organisasi sipil, komunitas faktual, dan gerakan antihoaks merupakan bentuk pertahanan demokrasi yang bersifat dari bawah (*bottom-up*) yang sangat vital.

Peran pemerintah mencakup tanggung jawab ganda: melindungi ruang digital dari penyalahgunaan sekaligus menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Investasi negara dalam infrastruktur digital yang merata, program peningkatan literasi digital nasional, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital merupakan kontribusi konkret bagi penguatan demokrasi. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses internet dan pendidikan digital agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dalam demokrasi digital (Efendi et al.,).

Peran media baik konvensional maupun digital tidak tergantikan sebagai penjaga gawang informasi publik. Media yang independen, profesional, dan berkomitmen pada standar jurnalistik yang tinggi merupakan penangkal alami terhadap gelombang disinformasi. Para aktor politik diharapkan menjalankan aktivitas politik secara jujur, etis, dan sesuai norma hukum serta nilai-nilai Pancasila. Media digital yang menjaga kredibilitasnya akan dengan sendirinya mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik inilah yang menjadi kunci konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

Demokrasi dan realitas kekuasaan di Indonesia

Berikut Demokrasi Indonesia dan realitas kekuasaan di Indonesia:

1. Demokrasi ideal : demokrasi yang ideal bermoto” dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang dimaksud dengan kalimat diatas Adalah kekuasaan negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil yang dipilih rakyat, dan hasilnya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi ideal menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan.
2. Demokrasi realitas : oleh elit, untuk elit, atas nama rakyat. Yang dimaksud dengan kalimat atas Adalah dalam kenyataan politik, keputusan sering lebih menguntungkan kelompok elite politik atau pemilik modal. Nama rakyat tetap

dipakai sebagai alasan, tetapi kepentingan rakyat belum tentu benar-benar diperjuangkan

3. Mekanisme hukum pemilu cenderung memperkuat dominasi elit (threshold, sistem tertutup dana kampanye). Yang dimaksud dengan kalimat atas Adalah aturan pemilu tertentu seperti threshold, sistem tertutup, atau mahal biaya kampanye membuat hanya kelompok kuat yang mudah masuk ke kekuasaan. Rakyat biasa atau calon independen menjadi sulit bersaing
4. Hukum pemilu seharusnya jadi pagar, bukan pagar yang dibeli oleh tuan rumah. Yang dimaksud dengan kalimat di atas adalah hukum pemilu harus berdiri adil untuk semua pihak, bukan dibuat demi keuntungan kelompok tertentu (Lutfi, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Tantangan utama yang teridentifikasi mencakup polarisasi opini dan disinformasi, melemahnya etika komunikasi dan budaya musyawarah, manipulasi politik melalui kampanye hitam dan buzzer, konflik horizontal, serta ketidaksetaraan akses informasi. Seluruh tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan respons yang bersifat sistemik dan lintas sektor.

Menjawab tantangan-tantangan tersebut membutuhkan sinergi erat antara tiga aktor utama: masyarakat sipil yang kritis dan melek digital, pemerintah yang menghadirkan regulasi seimbang dan infrastruktur merata, serta media yang independen dan berkomitmen pada standar jurnalistik tinggi. Ketiga elemen ini, ketika bekerja secara sinergis, mampu memastikan teknologi digital dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi Pancasila bukan sebaliknya.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa penguatan demokrasi digital di Indonesia harus diletakkan di atas fondasi nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial sebagai pedoman dalam menavigasi kompleksitas ruang digital yang terus berkembang.

Daftar pustaka

- Efendi, F., Safira, B. W., & Agustina, D. H. (n.d.). *Demokrasi Di Era Digital: Peluang Dan Ancaman*.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, Dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan Dan Kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Lutfi, M. (2025). *Dominasi Elit: Suatu Paradok Demokrasi Konstitusional “Antara Ancaman Atau Keniscayaan”*. <https://repository.uin-malang.ac.id/25060/>
- Natasya, D. D., Lestari, H., Juliani, I., & Aulia, J. (n.d.). *Demokrasi Pancasila Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi*.
- Sardini, N. H. (2018). *Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Prosiding Senaspolhi, 1.

- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <https://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Wafa, M. A. (2024). Demokrasi pluralistik: Tantangan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks Indonesia.
- Yacob, S. (n.d.). Kemahiran pemikiran sejarah: Meneroka makna demokrasi di Malaysia.